

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama dua dekade terakhir, telah terjadi perkembangan besar dalam integrasi keuangan di dunia internasional. Integrasi keuangan yang semakin berkembang ini menciptakan sejumlah besar aliran modal lintas batas di sesama negara maju dan antara negara maju dengan negara berkembang. Selain itu, seiring tumbuhnya integrasi keuangan, jejak lembaga keuangan asing tumbuh di seluruh dunia dan mengikat pasar keuangan global¹. Dampak dari integrasi keuangan yang semakin meningkat ini juga memicu munculnya berbagai instrumen keuangan yang kompleks dan inovatif.

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sebagai organisasi regional dalam kawasan yang mayoritas merupakan negara berkembang juga menginginkan adanya integrasi finansial nantinya di dalam kewasannya. ASEAN membuat dua kerangka kerja dari ASEAN Economic Community (AEC) untuk mencapai tujuannya tersebut. Dua kerangka kerja dari AEC telah disahkan dengan elemen integrasi dan liberalisasi keuangan. Kedua kerangka kerja AEC ini tujuannya untuk mencapai integrasi keuangan regional, inklusi keuangan dan stabilitas keuangan². Meskipun upaya tersebut tampak ambisius, inisiatif regional telah disepakati dan sebagian diimplementasikan di bidang perbankan, asuransi, rekening modal, pasar modal, sistem pembayaran dan penyelesaian, perpajakan, inklusi keuangan, stabilitas keuangan, ketahanan keuangan, dan keuangan berkelanjutan.

¹ M. Ayhan Kose et al., "Financial Globalization: A Reappraisal," IMF Working Papers 06, no. 189 (2006): 1.

² Koichi Ishikawa, "The ASEAN Economic Community and ASEAN Economic Integration," Journal of Contemporary East Asia Studies 10, no. 1 (March 2, 2021): 1–18, .

Wacana integrasi finansial ASEAN sudah dibicarakan sejak pertemuan pertama ASEAN Finance Minister and Central Bank Governors (AFMGM) di Phuket, Thailand pada bulan Maret 1997. Ini terlihat pada diinisiasinya *The Working Committee on Payment and Settlement Systems* (WC-PSS) dan ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) untuk membangun infrastruktur pasar yang kuat. WC-PSS dibentuk pada tahun 2010 dan bertanggung jawab untuk pengembangan dan implementasi sistem pembayaran dan penyelesaian di negara-negara anggota ASEAN³. ABIF diinisiasikan pada tanggal Desember 2014 yaitu kerangka kerja yang bertujuan mengintegrasikan ekonomi-finansial melalui perbankan di ASEAN⁴. ABIF memfasilitasi kerja sama bilateral-multilateral yang memungkinkan perbankan suatu negara untuk melakukan perluasan ke luar negeri. Di antara negara-negara anggota ASEAN, Indonesia dan Malaysia sudah mulai mengimplementasikan dengan penuh dan memimpin pengerjaan kerangka ini. Pada tanggal 8 April 2022 dalam pertemuan AFMGM ke-8, ASEAN akhirnya sepakat untuk memanfaatkan masa pemulihan ekonomi setelah berakhirnya pandemi Covid-19 untuk mendorong stabilitas dan integrasi keuangan di ASEAN. Dalam pertemuan ini juga dibicarakan tentang peningkatan integrasi finansial ASEAN di era digital.

Walaupun ABIF sudah terbentuk dan terimplementasikan di Indonesia, Thailand, dan Malaysia, ASEAN masih memiliki ketergantungan lebih terhadap pasar keuangan global daripada negara anggota sendiri. Transaksi perdagangan intra-ASEAN tidak mengalir langsung antara negara yang bersangkutan, tetapi

³ ASEAN, "Major Committees and Sectoral Bodies," asean.org (ASEAN, 2020), diakses Juli, 2023 .

⁴ Asian Development Bank, "ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) Initiative," aric.adb.org (Asian Development Bank, 2014), diakses 27 Juli, 2023, .

harus terlebih dahulu 'transit' melalui pasar keuangan di luar ASEAN sebelum diterima oleh negara-negara ASEAN⁵.

Dalam kerangka ABIF, Ada kerangka kerja Local Currency Settlement Framework (LCSF) yang membuat pembayaran antara negara anggota terjadi langsung antara dua negara daripada melalui ASEAN di luar perantara dengan memanfaatkan mata uang lokal dengan penggunaan sistem Local Currency Settlement (LCS)⁶. LCSF merupakan sebuah kerangka kerja yang digunakan mempromosikan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan investasi di antara ketiga negara, sehingga dapat mengurangi ketergantungan mereka pada mata uang utama seperti Dolar Amerika Serikat (USD). Melalui kerangka kerja ini, LCSF dapat membantu meningkatkan efisiensi transaksi dan mengurangi biaya transaksi. Selain itu, LCSF juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada nilai tukar dolar AS sambil meningkatkan keterhubungan finansial antara negara-negara anggota⁷.

Indonesia berinisiatif dalam mempercepat integrasi finansial ASEAN melalui inovasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang telah berhasil diimplementasikan dengan baik di negaranya sendiri sejak pertengahan tahun 2019⁸. Penggunaan QRIS terus berkembang dengan cepat pada skala nasional dan sekarang telah digunakan oleh lebih dari 12 juta *merchant* di seluruh

⁵ SWIFT, “Achieving Financial Integration in the ASEAN Region” SWIFT – the Global Provider of Secure Financial Messaging Services, diakses 2 November, 2022.

⁶ SWIFT, “Achieving Financial Integration in the ASEAN Region”

⁷ SWIFT, “Achieving Financial Integration in the ASEAN Region”

⁸ Erwin Haryono, “Transaksi QR Antar Negara Dukung Integrasi Keuangan ASEAN,” www.bi.go.id, diakses 2 November, 2022, .

Indonesia⁹. Keberhasilan QRIS di Indonesia terjadi akibat QRIS dirilis pada era pandemi Covid-19, ketika digitalisasi untuk mengurangi interaksi fisik sangat penting. Selain itu, layanan QRIS memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi dengan setiap *e-wallet* menggunakan kode quick-response (QR Code) tunggal dengan mudah.

Keberhasilan QRIS di Indonesia, membuat Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) selaku Bank Sentral Indonesia untuk memperluas layanan ini dengan berkolaborasi dengan negara-negara ASEAN. QRIS dilihat sebagai momentum penting dalam inisiatif integrasi keuangan ASEAN yang dipelopori oleh Indonesia. Salah satu bentuk keberhasilan implementasi QRIS yang telah dilaksanakan oleh Indonesia adalah di Thailand melalui QRIS Cross-border pada bulan Agustus 2022¹⁰. Kolaborasi QRIS Cross-border mencakup standarisasi pembayaran kode QR di masing-masing negara yang telah mengimplementasikan QRIS Cross-border. Di Thailand dengan aplikasi pembayaran menggunakan PromptPay¹¹ dan Malaysia yang menggunakan aplikasi standar DuitNow, yang memiliki standar QR yang sebanding dan sama dengan QRIS¹². Keterkaitan finansial antara negara-negara yang telah mengimplementasikan QRIS Cross-border bersifat timbal balik, inklusif, dan sebanding dengan dimasukkannya standar lokal negara-negara mitra.

⁹ Erwin Haryono, "Ekonomi Digital Terus Tumbuh, QRIS Tembus 12 Juta Merchant," www.bi.go.id (Bank Indonesia, November 2, 2021), terakhir dimodifikasi 2 November, 2021, diakses Maret, 2023, .

¹⁰ Erwin Haryono, "Transaksi QR Antar Negara Dukung Integrasi Keuangan ASEAN,"

¹¹ Bank Of Thailand dan Bank Indonesia, "Joint Press Release Indonesia and Thailand Launch Cross-Border QR Payment Linkage," www.bot.or.th, diakses 2 November, 2022.

¹² Bank Negara Malaysia dan Bank Indonesia, "Launch of the Cross-Border QR Payment Linkage between Malaysia and Indonesia - Bank Negara Malaysia," www.bnm.gov.my, diakses 27 Juli 2023.

QRIS Cross-border diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi pengembangan jaringan pembayaran lintas batas di kawasan ASEAN. Inisiatif ini dapat menempatkan ASEAN sebagai yang terdepan secara global dalam konektivitas pembayaran ritel digital yang inklusif. Melalui QRIS Cross-border yang diinisiasikan oleh Indonesia ini, negara-negara anggota ASEAN dapat bekerja sama mengintegrasikan mata uang digital mereka. Hal ini memungkinkan ASEAN untuk mencapai integrasi mata uang dan finansial yang lebih besar seperti Uni Eropa. Ini adalah tonggak penting bagi ASEAN melalui inisiatif Indonesia untuk meningkatkan konektivitas dan memperkuat stabilitas ekonomi di kawasan. Selain itu, penerapan LCS dalam QRIS Cross-border juga dapat memberikan manfaat lain bagi ASEAN, seperti memperkuat kerja sama regional dan memperkuat posisi kawasan dalam ekonomi global¹³.

1.2 Rumusan Masalah

Integrasi finansial ASEAN merupakan salah satu tujuan strategis bagi negara-negara ASEAN untuk menciptakan pasar regional yang lebih terintegrasi dan efisien, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang sukses diimplementasikan di Indonesia mendorong Pemerintah Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia (BI) untuk memperluas layanan QRIS melalui kemitraan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Kolaborasi QRIS Cross-border antara Indonesia, Thailand, dan Malaysia mencakup standardisasi pembayaran kode QR di masing-masing negara, dengan harapan dapat menjadi langkah awal bagi pengembangan sistem pembayaran lintas batas di kawasan ASEAN. Inisiatif ini memungkinkan ASEAN

¹³ Erwin Haryono, "Transaksi QR Antar Negara Dukung Integrasi Keuangan ASEAN,"

untuk mencapai integrasi mata uang dan finansial seperti Uni Eropa walaupun hanya secara digital. Penelitian ini dilakukan untuk melihat peran Indonesia dalam mendorong integrasi keuangan ASEAN melalui QRIS Cross-border.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari penjelasan rumusan masalah dan latar belakang diatas, pertanyaan penelitian yang dijawab, yaitu “Bagaimana peran Indonesia dalam integrasi finansial ASEAN melalui QRIS Cross-border?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Indonesia dalam integrasi keuangan ASEAN melalui QRIS Cross-border.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum, khususnya bagi mahasiswa Hubungan Internasional terkait peran Indonesia dalam integrasi finansial ASEAN melalui QRIS Cross-border.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi serta pengetahuan bagi pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan finansial baru kedepannya terkait QRIS Cross-border, khususnya Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Luar Negeri.

1.6 Studi Pustaka

Adapun lima studi pustaka yang relevan dengan topik penelitian ini yang dapat digunakan dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut.

Studi Pustaka yang pertama adalah “*Banking integration in ASEAN-6: An empirical investigation*” oleh Dao Ha, Philippe Gillet, Phuong Lea, dan Dinh-Tri

Voc tahun 2020 yang membahas tentang Integrasi perbankan secara luas. Integrasi perbankan dianggap sebagai batu loncatan terakhir dari integrasi ekonomi, terutama di tingkat regional seperti ASEAN. Artikel membahas langkah-langkah keterbukaan perbankan yang lebih luas dan tingkat integrasi yang seimbang secara keseluruhan melalui aliran modal dengan menggunakan data triwulanan dari negara-negara ASEAN-6 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam) dari tahun 1996 hingga 2016. Tulisan ini menemukan faktor pendorong utama integrasi perbankan di kawasan ASEAN adalah kualitas regulasi, ukuran bank, dan risiko kredit global¹⁴. Artikel ini digunakan peneliti untuk melihat integrasi finansial melalui proses integrasi perbankan di ASEAN. Artikel ini membahas tentang integrasi finansial ASEAN secara umum sementara peneliti akan meneliti peran Indonesia dalam integrasi finansial melalui QRIS Cross-border.

Artikel kedua berjudul “SEPA: A New Hope” dari buku “EU Payment Integration” yang ditulis oleh Ruth Wandhöfer di tahun 2010 tentang proses integrasi pembayaran di Uni Eropa. Tulisan membahas tentang integrasi pembayaran di Uni Eropa dan pengaruh teknologi baru pada industri keuangan. SEPA atau Single Euro Payment Area adalah sebuah inisiatif integrasi pembayaran di Uni Eropa yang bertujuan untuk menciptakan satu pasar tunggal untuk pembayaran dalam euro. Inisiatif ini memungkinkan transaksi pembayaran dalam euro untuk dilakukan dengan mudah, cepat, dan efisien di seluruh negara anggota Uni Eropa, dengan biaya yang lebih rendah dan standar yang sama untuk pembayaran domestik dan *cross-border*.

¹⁴ Dao Ha et al., “Banking Integration in ASEAN-6: An Empirical Investigation,” *Economic Modelling* 91 (September 2020): 705–719.

SEPA mencakup transfer bank, *direct debit*, dan kartu pembayaran. Inisiatif ini diperkenalkan oleh Dewan dan Komisi Eropa pada tahun 2002 dan telah diterapkan secara bertahap sejak itu. Artikel ini menganalisis upaya Komisi Eropa untuk menyempurkan sistem transaksi keuangan dan reaksi pasar terhadap kebijakan ini¹⁵. Artikel ini dapat digunakan sebagai pembandingan sistem pembayaran terintegrasi SEPA di Uni Eropa dengan sistem pembayaran QRIS Cross-border di ASEAN. Artikel ini membahas tentang integrasi sistem keuangan baru dengan teknologi baru pada saat itu di Uni Eropa sementara peneliti akan meneliti integrasi sistem keuangan dengan teknologi baru di ASEAN dan peran Indonesia dalam integrasi finansial ASEAN dengan QRIS Cross-border.

Artikel selanjutnya berjudul “*Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand: Penguatan Local Currency Settlement (LCS) Framework Dalam Memfasilitasi Perdagangan*” oleh Aldy Nofansya dan Hasan Sidik tahun 2022. Artikel ini membahas akan kerja sama *Local Currency Settlement* (LCS) Indonesia-Malaysia-Thailand merupakan kerja sama dalam memanfaatkan penggunaan mata uang lokal untuk penyelesaian transaksi perdagangan antara ketiga negara. Artikel ini membahas kerja sama *Local Currency Settlement* (LCS) antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang bertujuan memanfaatkan penggunaan mata uang lokal untuk penyelesaian transaksi perdagangan antara ketiga negara. Namun, kesadaran para aktor ekspor-impor yang belum terbiasa dengan LCS menjadi hambatan utama dalam pengenalan LCS sebagai alternatif penyelesaian transaksi komersial. Artikel ini menggambarkan bagaimana penguatan penyelesaian mata uang lokal dilakukan

¹⁵ Ruth Wandhöfer, “SEPA: A New Hope,” in *EU Payments Integration* (London: Palgrave MacMillan, 2010), 33–76.

dalam proses mempromosikan kerja sama ekonomi antara ketiga negara, khususnya di sektor perdagangan.

Ada dua hal yang dapat dilakukan untuk merangsang penggunaan LCS dalam meningkatkan perdagangan: meningkatkan dampak positif yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan LCS terhadap organisasi dan memotivasi peserta komersial untuk menggunakan LCS daripada terlibat dalam transaksi perdagangan dengan mempromosikan penggunaannya sebagai alternatif untuk berdagang¹⁶. Artikel ini digunakan untuk mengetahui lebih lanjut tentang kerangka kerja Local Currency Settlement (LCS) dan kerjasama yang telah dilakukan negara anggota ASEAN dalam implementasinya. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti melihat salah satu bentuk kerjasama yang juga ikut menyinggung tentang LCS yang diinisiasi oleh Indonesia yaitu QRIS Cross-border dan peran Indonesia dalam integrasi finansial ASEAN dengan QRIS Cross-border.

Artikel berikutnya berjudul “*Digitalization of cross-border payments*” oleh Dong He tahun 2021. Artikel ini berfokus pada implikasi teknologi digital untuk pembayaran lintas batas. Artikel ini membahas pengaruh teknologi digital pada pembayaran lintas batas. Artikel ini menjelaskan tentang aplikasi digital dalam layanan keuangan, struktur pasar, dan kemungkinan evolusi sistem pembayaran lintas batas nantinya. Artikel juga membahas tentang mata uang internasional dan mata uang asing yang digunakan dalam transaksi lintas batas, serta pengaruh CBDC atau Central Bank Digital Currencies sebagai alat pembayaran lintas batas.

¹⁶Aldy Nofansya and Hasan Sidik, “Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand: Penguatan Local Currency Settlement (LCS) Framework Dalam Memfasilitasi Perdagangan,” *Padjadjaran Journal of International Relations* 4, no. 2 (August 12, 2022): 164–178..

CBDC adalah salah satu alternatif mata uang lintas batas karena kesederhanaan, kemudahan penggunaan, dan potensi penghematan biaya. Artikel ini juga menemukan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat suatu negara juga akan mempengaruhi penggunaan CBDC di negara lain¹⁷. Artikel ini digunakan untuk melihat penggunaan aplikasi digital sebagai pembayaran lintas batas dan dampaknya terhadap negara-negara yang menggunakannya. Artikel ini hanya membahas tentang penggunaan aplikasi digital sebagai pembayaran lintas batas secara umum sementara penelitian akan melihat penggunaan aplikasi digital sebagai pembayaran lintas batas di ASEAN yang diinisiasi oleh Indonesia yaitu QRIS Cross-border serta peran Indonesia dalam integrasi finansial ASEAN dengan QRIS Cross-border..

Artikel terakhir berjudul *“Factor Affecting Digital Payments Using QRIS On Merchant During Covid-19: Case Study in Indonesia Provinces”* oleh Ajisatrio Anggadipati dan Yunieta Anny Nainggolan yang diterbitkan Oktober 2022. Artikel ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem pembayaran QRIS di Indonesia selama pandemi Covid-19. QRIS adalah inovasi dari Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia yang memungkinkan transaksi pembayaran lebih efektif dan mempercepatnya tanpa perlu membawa uang tunai.

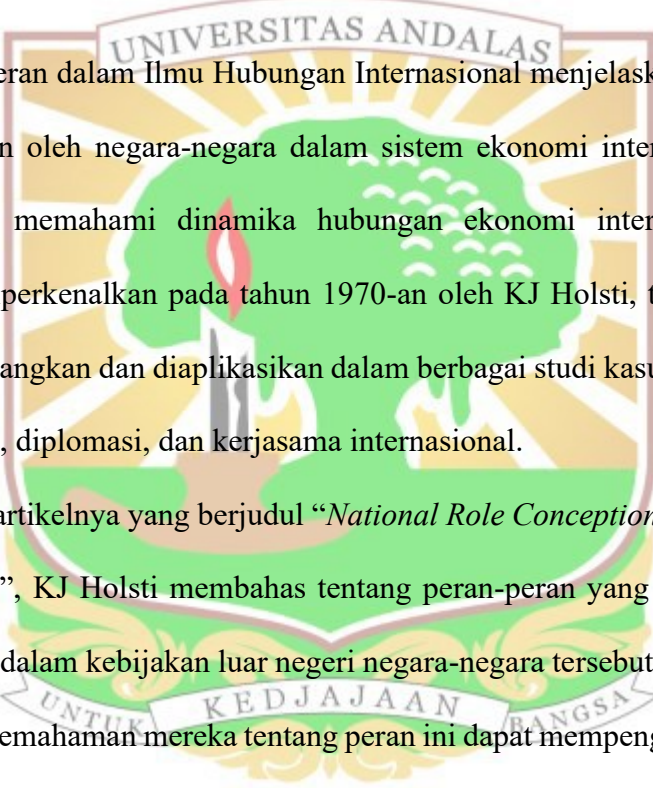
Artikel ini menggunakan perspektif ekonomi makro dan mempertimbangkan faktor inklusi keuangan, tingkat pendidikan, dan penggunaan internet dalam meneliti produk dan layanan sebagai faktor penting dalam adopsi metode pembayaran digital menggunakan QRIS oleh pedagang di seluruh provinsi

¹⁷ Dong He, “Digitalization of Cross-Border Payments,” *China Economic Journal* 14, no. 1 (January 11, 2021): 26–38.

Indonesia¹⁸. Artikel ini digunakan peneliti untuk mengetahui keberhasilan implementasi QRIS di Indonesia yang merupakan salah satu faktor Indonesia ingin mengimplementasikan sistem pembayaran QRIS di ASEAN. Penelitian yang akan dilakukan peneliti akan membahas tentang implementasi QRIS di ASEAN dan peran Indonesia dalam integrasi finansial ASEAN dengan QRIS Cross-border.

1.7 Kerangka Pemikiran

1.7.1 Teori Peran



Teori peran dalam Ilmu Hubungan Internasional menjelaskan bahwa peran yang dimainkan oleh negara-negara dalam sistem ekonomi internasional sangat penting untuk memahami dinamika hubungan ekonomi internasional. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an oleh KJ Holsti, teori peran telah banyak dikembangkan dan diaplikasikan dalam berbagai studi kasus, seperti dalam analisis konflik, diplomasi, dan kerjasama internasional.

Dalam artikelnya yang berjudul “*National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*”, KJ Holsti membahas tentang peran-peran yang dimainkan oleh negara-negara dalam kebijakan luar negeri negara-negara tersebut, dan bagaimana konsepsi atau pemahaman mereka tentang peran ini dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri yang negara tersebut ambil¹⁹.

Menurut Holsti, peran nasional adalah konsepsi yang dimiliki oleh suatu negara tentang bagaimana negara tersebut seharusnya bertindak di dalam sistem internasional. Konsepsi ini dapat mencakup pandangan tentang peran negara

¹⁸ Ajisatrio Anggadipati and Yunieta Anny Nainggolan, “Factor Affecting Digital Payments Using QRIS on Merchant during Covid-19: Case Study in Indonesia Provinces,” *International Journal of Business and Technology Management* 4, no. 3 (October 1, 2022).

¹⁹ K. J. Holsti, “National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy,” *International Studies Quarterly* 14, no. 3 (1970): 309.

tersebut dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mempromosikan nilai-nilai tertentu seperti demokrasi atau hak asasi manusia, atau menjalankan peran sebagai pemimpin regional atau global. Holsti juga mengusulkan tiga konsep utama terkait teori peran yaitu *role conception*, *role prescription*, *role performance*, dan *position*²⁰.

Role conception merujuk pada cara individu atau kelompok dalam masyarakat memandang peran negaranya dalam sistem internasional. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sejarah, budaya, dan ideologi. Misalnya, negara dengan tradisi pacifisme yang kuat mungkin memandang dirinya sebagai mediator netral dalam konflik, sementara negara dengan sejarah dominasi militer mungkin menganggap dirinya sebagai kekuatan regional. Kedua, *role prescription* merujuk pada ekspektasi dari pihak eksternal terhadap peran negara dalam sistem internasional. Ini dapat mencakup harapan dari sekutu, lawan, dan organisasi internasional. Ekspektasi ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor seperti geografi, kepentingan ekonomi, dan keamanan. Lalu, *role performance* yang merujuk pada perilaku sebenarnya negara dalam sistem internasional. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk politik domestik, tekanan internasional, dan tindakan negara lain. *Role performance* dapat sesuai atau tidak sesuai dengan konsepsi peran dan resep dari negara. Sementara, *Position* atau *Nations Status* merujuk pada status atau posisi suatu negara di dalam sistem internasional.

Holsti berpendapat bahwa konsepsi peran nasional penting dalam membentuk kebijakan luar negeri karena membantu menentukan kepentingan, tujuan, dan nilai negara. Dengan memahami konsepsi peran negara, pembuat

²⁰ K. J. Holsti, "National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy," 239.

kebijakan dapat lebih memprediksi perilakunya dan menyesuaikan strategi mereka secara tepat. Namun, Holsti juga beranggapan bahwa konsepsi peran dapat berubah dari waktu ke waktu, terutama sebagai respons terhadap perubahan lingkungan internasional dan politik domestik. Holsti juga mengklasifikasikan peran-peran negara dalam 17 kategori konsepsi peran nasional dibawah ini²¹.

1. *Bastion of Revolution-Liberator*

Beberapa negara beranggapan bahwa salah satu peran negara adalah memimpin tindakan revolusioner di luar negeri. Tujuan utama negara ini adalah membantu aktor lain untuk merdeka atau menjadi pelindung bagi gerakan revolusioner, dengan memberikan bantuan fisik dan moral serta menginspirasi ideologi bagi pemimpin revolusi di negara lain.

2. *Regional Leader*

Jenis konsepsi peran nasional ini lebih mengacu pada tanggung jawab atau tugas khusus yang dirasakan oleh suatu pemerintah dalam hubungannya dengan negara-negara di suatu wilayah atau kawasan tertentu, atau dalam subsistem lintas sektoral seperti gerakan komunis internasional. Dengan kata lain, ini menggambarkan bagaimana suatu negara memandang tanggung jawabnya terhadap lingkungan geopolitik dan geostrategisnya.

3. *Regional Protector*

Jenis konsepsi peran nasional ini, meskipun tidak diungkapkan secara langsung, menunjukkan bahwa suatu pemerintahan memiliki tanggung jawab kepemimpinan khusus dalam suatu wilayah regional atau isu tertentu. Namun, penekanan utama dari konsepsi peran nasional jenis ini adalah untuk menyediakan

²¹ K. J. Holsti, "National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy," 260-271.

perlindungan bagi wilayah tetangga. Dengan kata lain, konsep ini menempatkan fokus pada fungsi keamanan dan perlindungan wilayah regional.

4. *Active Independent*

Peran ini menyatakan bahwa politik luar negeri suatu negara haruslah dilakukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan nasionalnya sendiri dan tidak untuk melayani kepentingan negara lain. Selain itu, negara yang mengadopsi konsepsi peran ini bebas untuk menjalin hubungan dengan sebanyak mungkin negara dan mengelola hubungannya dengan cara yang aktif. Konsepsi peran ini juga menekankan pada nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan kebijakan sendiri, mendorong terciptanya fungsi mediasi, serta memperluas hubungan diplomatik dan ekonomi ke berbagai area di seluruh dunia. Dengan demikian, konsepsi peran ini menggambarkan betapa pentingnya negara dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasionalnya sambil terus memperkuat hubungan dengan negara-negara lain di seluruh dunia.

5. *Liberation Supporter*

National role conception jenis ini berbeda dengan jenis *Bastion of the Revolution-Liberator* yang telah dijelaskan sebelumnya. Konsepsi peran nasional ini tidak menunjukkan adanya tanggung jawab formal untuk mengorganisir, memimpin, atau mendukung gerakan pembebasan di luar negeri secara fisik. Pernyataan-pernyataan yang muncul dari konsepsi peran nasional ini biasanya hanya mendukung gerakan pembebasan secara formal dan rutin, dan tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai tindakan konkret yang akan diambil untuk menerapkan konsepsi peran nasional tersebut. Konsepsi peran nasional jenis ini lebih menekankan pada dukungan terhadap gerakan pembebasan secara tidak

langsung, melalui pernyataan formal dan sikap yang tidak terstruktur namun tetap mendukung nilai-nilai yang dipegang oleh negara tersebut. Dengan demikian, konsepsi peran nasional ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung gerakan pembebasan, tetapi tidak secara fisik dan formal bertindak sebagai pemimpin atau pengorganisir dari gerakan tersebut.

6. *Anti-Imperialist Agent*

Ketika mendapat ancaman serius dari imperialisme, banyak pemerintah melihat diri mereka sebagai pejuang melawan kekuatan imperialisme tersebut. Namun, tidak semua pemerintah yang merasa terancam oleh imperialisme hanya terbatas pada negara-negara yang memiliki partai komunis. Konflik antara kekuatan imperialis dan negara-negara yang menganggap diri mereka sebagai agen perlawanan tidak terbatas pada ideologi tertentu, tetapi lebih terkait dengan upaya melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional. Oleh karena itu, pemerintah mana pun yang merasa terancam oleh imperialisme dapat memandang diri mereka sebagai pejuang dalam perjuangan melawan kekuatan asing yang mencoba untuk memaksakan kehendak mereka dan mengambil alih sumber daya negara.

7. *Defender of The Faith*

Ada beberapa pemerintahan yang melihat tujuan dan komitmen dalam politik luar negeri negara adalah melindungi nilai-nilai dalam sistem, bukan hanya masalah teritorial tertentu. *National role conception* jenis *defender of the faith* mengharuskan negara untuk bertanggung jawab dalam memastikan kemurnian ideologi dalam kelompok negara atau organisasi antarnegara tertentu. Hal ini berarti bahwa pemerintah yang mengadopsi peran ini harus melindungi nilai-nilai yang dianggap penting bagi kelompok negara tersebut, seperti agama atau ideologi

politik, dari serangan dan pengaruh asing yang tidak diinginkan. Dalam melakukan tugas ini, negara akan memastikan bahwa negara-negara lain dalam kelompok tersebut mematuhi nilai-nilai yang telah disepakati dan menjaga integritas kelompok secara keseluruhan.

8. *Mediator-Integrator*

Dalam penelitian Holsti yang melibatkan 71 negara, banyak pemerintahan merasa bahwa mereka mampu atau bertanggung jawab untuk melakukan tugas khusus dalam membantu meredakan konflik antar negara atau kelompok negara. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memandang diri mereka sebagai mediator yang memiliki peran penting dalam mengatasi perbedaan antara pihak yang terlibat dalam konflik. *National role conception* ini menekankan pada persepsi bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk terus membantu meredakan konflik dan mencapai perdamaian di antara pihak yang bertikai.

9. *Regional-Subsystem Collaborator*

National role conception jenis ini menunjukkan komitmen dari sebuah pemerintahan untuk bekerja sama dengan negara lain dalam membangun sebuah komunitas yang lebih besar atau untuk subsistem lintas batas seperti Gerakan Komunis. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan tersebut memiliki peran yang penting dalam mempromosikan kerjasama internasional dan memperkuat hubungan dengan negara lain guna mencapai tujuan bersama.

10. *Developer*

National role conception jenis ini mengarah pada tanggung jawab khusus untuk membantu negara-negara yang kurang berkembang. Pemerintah yang mengambil peran ini berupaya memperkuat kapasitas negara-negara tersebut untuk

mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Pernyataan dalam peran ini juga menunjukkan bahwa pemerintah menganggap tugas ini sebagai kepentingan nasional dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi negara mereka sendiri.

11. *Bridge*

National role conception ini cenderung tidak jelas atau ambigu, sehingga kebijakan yang diambil sulit terlihat. Sementara itu, peran mediator-integrator di atas mengindikasikan adanya upaya untuk menempatkan diplomat ke area atau isu konflik tertentu. Peran bridge biasanya melibatkan fungsi komunikasi yang bertindak sebagai "penerjemah" atau penghubung pesan dan informasi antara orang-orang dari berbagai budaya yang berbeda.

12. *Faithful Ally*

National role conception ini menunjukkan kesediaan suatu pemerintahan untuk melakukan dukungan secara spesifik dan jelas terhadap kebijakan dari pemerintahan lain. Negara dapat membuat suatu kebijakan yang menyatakan bahwa mereka akan mendukung sekutu dengan berbagai cara. Akan tetapi, negara tidak akan terlalu mengharapkan bantuan dari sekutu tersebut walaupun negara telah menyatakan dukungan dan bantuannya kepada negara sekutu.

13. *Independent*

National role conception ini menekankan bahwa suatu pemerintahan harus menentukan kebijakannya sesuai dengan kepentingan nasionalnya sendiri. Negara juga tidak terikat pada tujuan dari negara lain atau kelompok negara tertentu. Peran ini bersifat non-blok dan tidak memiliki tugas atau fungsi tertentu dalam sistem.

14. *Example*

National role conception ini menekankan pada pentingnya memperkuat posisi suatu negara di kancah internasional melalui kebijakan domestik tertentu. Hal ini bisa dilakukan tanpa membutuhkan program diplomatik resmi atau tugas khusus di luar batas wilayah negara. Konsepsi peran ini membuat negara merasa harus bisa mempromosikan negaranya dan memperdalam pengaruhnya di sistem internasional dengan cara menjadi suatu contoh bagi negara-negara lainnya.

15. *Internal Development*

Peran ini menitikberatkan pada upaya pemerintahan dalam menyelesaikan masalah internal negara dan tidak memiliki tugas khusus di dalam sistem internasional. Pemerintahan yang mengadopsi peran ini lebih memfokuskan upayanya untuk mengatasi masalah dalam negeri. Meskipun demikian, peran ini tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama internasional, seperti dalam bidang ekonomi atau teknologi.

16. *Isolate*

Peran ini mengakibatkan suatu negara untuk mengurangi interaksi dengan dunia internasional dan menjaga jarak dari keterlibatan dalam bentuk apapun. Pernyataan dari peran ini menunjukkan kekhawatiran terhadap keterlibatan di dunia luar dan menekankan pentingnya ketergantungan akan sumber daya internal negara. Peran ini mengakibatkan negara untuk berinteraksi seminimal mungkin dengan dunia internasional.

17. *Protectee*

Beberapa pemerintahan beranggapan bahwa negara lain memiliki tanggung jawab untuk melindungi negara mereka, namun tidak menyatakan tujuan, orientasi,

tugas, atau fungsi tertentu dalam hubungannya dengan lingkungan luar. Pernyataan tersebut lebih terkait dengan hubungan antar negara daripada peran yang dimainkan oleh suatu negara di dalam sistem internasional. Peran ini membuat negara menyinggung tanggung jawab negara lain untuk ikut membela mereka nantinya.

Holsti menyoroti pentingnya memahami konsepsi peran nasional dalam memahami kebijakan luar negeri suatu negara. Konsepsi ini dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri dalam beberapa cara²². Pertama, konsepsi peran nasional dapat mempengaruhi prioritas kebijakan luar negeri dan pemilihan strategi. Sebagai contoh, negara yang menganggap dirinya sebagai *regional leader* dapat cenderung lebih agresif dalam mempertahankan pengaruhnya di wilayah tersebut daripada negara yang menganggap dirinya sebagai *mediator-integrator*.

Kedua, konsepsi peran nasional juga dapat mempengaruhi persepsi negara terhadap tindakan dan kebijakan luar negeri dari negara lain. Sebagai contoh, negara yang menganggap dirinya sebagai pelindung perdamaian dapat menilai tindakan militer dari negara lain sebagai tindakan yang tidak beradab, sementara negara yang menganggap dirinya sebagai kekuatan militer dapat memandang tindakan militer sebagai tindakan yang sah dan diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Ketiga, konsepsi peran nasional juga dapat mempengaruhi hubungan bilateral antara negara. Sebagai contoh, negara yang menganggap dirinya sebagai *regional leader* dapat merasa terancam oleh upaya negara lain untuk memperkuat posisinya di wilayah tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh KJ Holsti. 17 konsepsi peran nasional dari teori Holsti bisa

²² K. J. Holsti, "National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy," 298.

membantu memahami bagaimana negara memainkan peran dalam sistem internasional dan bagaimana peran tersebut memengaruhi hubungan internasional antara negara-negara tersebut dan kebijakan luar negeri mereka. Teori peran dari KJ Holsti inilah yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif eksploratif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan akan analisa data dari teori yang ada dengan sumber data tertulis atau lisan dari objek yang dapat diamati²³. Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman awal mengenai suatu fenomena atau masalah yang belum banyak diketahui. Metode ini biasanya digunakan ketika informasi atau data yang tersedia tentang topik yang sedang dipelajari masih terbatas atau bahkan tidak ada²⁴. Setelah melakukan deskripsi dan analisis, ditemukan peran penting yang dimainkan oleh Indonesia dalam integrasi finansial ASEAN melalui QRIS Cross-border.

1.8.2 Batasan Penelitian

Untuk lebih memahami tujuan penelitian, diperlukan batasan-batasan yang jelas. Dalam konteks ini, peneliti membatasi penelitian dengan dua aspek, yaitu batasan waktu yaitu ketika fenomena terjadi dan batasan masalah yang dihadapi

²³ Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, . Hak Cipta , Pada Penulis, 2014).

²⁴ Ida Bagus Mantra, Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial (Pustaka Pelajar, 2004), 37–39.

dalam penelitian. Batasan masalah dari penelitian ini adalah peran Indonesia dalam integrasi finansial ASEAN melalui QRIS Cross-border. Sementara batasan waktu yang dipilih oleh peneliti dimulai dari tahun 2022-hingga penelitian ini dilakukan, dikarenakan pada tahun 2022 QRIS Cross-border mulai diimplementasikan secara penuh di Indonesia dan Thailand.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Dalam penelitian, konsep unit analisis merujuk pada objek yang akan dipelajari dan dianalisis. Sementara itu, unit eksplanasi merujuk pada unit yang berperan dalam mempengaruhi perilaku dari unit analisis tersebut. Selanjutnya, level atau tingkat analisis mengacu pada posisi atau kedudukan dari unit yang menjadi objek kajian, baik itu pada level individu, kelompok, organisasi, atau masyarakat. Adapun tingkat analisis ini membantu peneliti dalam menjelaskan cakupan area yang akan diteliti dan dianalisis secara lebih terperinci.²⁵

Dalam penelitian ini, unit analisis yang menjadi fokus kajian adalah Indonesia sedangkan unit eksplanasi yang dipertimbangkan adalah integrasi finansial ASEAN melalui QRIS Cross-border. Lebih lanjut, penelitian ini akan memfokuskan analisis pada tingkat analisis sistem internasional, karena peneliti ingin memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai peran Indonesia dalam integrasi finansial ASEAN melalui QRIS Cross-border dari perspektif negara.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif, oleh karena itu penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang

²⁵ Mohtar Mas'ud, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi (Jakarta: LP3ES, 1990). 35-286.

diperoleh dari sumber lain seperti laporan, dokumen, e-book, surat kabar, hasil laporan penelitian, Undang-Undang atau kebijakan yang telah dibuat serta arsip berbagai laporan kegiatan dan data statistik. Data sekunder juga dapat ditemukan di berbagai literatur seperti buku, jurnal, skripsi, website, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian harus teruji keabsahannya.

Dalam penelitian mengenai QRIS Cross-border, data sekunder dapat ditemukan di situs resmi Bank Indonesia, ASEAN, Bank of Thailand, Bank Malaysia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pemerintah Indonesia. Selain itu, data sekunder juga dapat diperoleh dari berbagai sumber pendukung seperti buku EU Payments Integration dan QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0. Jurnal-jurnal dari Oxford, Cambridge, International Studies, Journal of Contemporary East Asia Studies, Asian Economic Papers, Foreign Policy Analysis, dan Padjadjaran Journal of International Relations. Penelitian ini juga digunakan untuk mendapat data sekunder di penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan *working paper* yang dikeluarkan oleh Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT), IMF, Bank Indonesia, Asian Development Bank, dan ASEAN. Terakhir, Penelitian ini juga menggunakan *conference paper* seperti The 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019) dan The 4th International Conference on European Integration 2018. Penelitian ini juga menggunakan hasil ringkasan dari seminar-seminar yang diadakan oleh ASEAN, Pemerintah Indonesia, Bank Indonesia yang berhubungan dengan penelitian ini untuk menjadi data tambahan seperti Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), side event berjudul “Advancing Digital

Economy and Finance: Synergistic and Inclusive Ecosystem For Accelerated Recovery - Cross Border Payment” dalam seminar singkat dari P. Vasudevan, perwakilan Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) dan Andrew McCormack, Kepala Pusat Bank for International Settlements (BIS) Innovation Hub Singapura dan seminar High Level Seminar (HLS) From ASEAN to The World “Payment System in Digital Era” yang diadakan oleh Bank Indonesia pada tanggal 28 Maret 2023, dengan narasumber Filiangsih Hendarta, Asisten Gubernur Bank Indonesia dan Budi Gandasoebrata, Direktur Utama Gopay.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam menjawab pertanyaan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yang melibatkan proses pengumpulan dan analisis data yang lebih detail dan mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder yang diperoleh dari studi literatur, seperti buku, jurnal, dan berbagai laporan terkait QRIS Cross-border. Setelah itu, peneliti melakukan proses pengelompokan dan pemisahan data menjadi bab-bab yang menjelaskan secara berurutan mengenai topik penelitian dengan menggunakan konsep yang sesuai.

Selanjutnya, data yang telah dikelompokkan tersebut dianalisis untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian yang diangkat. Dalam hal ini, data kualitatif berupa pernyataan verbal yang didapatkan selama proses wawancara menjadi fokus utama analisis, sementara data statistik dari studi literatur hanya digunakan sebagai penunjang fakta yang dijelaskan dalam penelitian ini. Dengan demikian, teknik analisis data kualitatif memberikan

kesempatan kepada peneliti untuk memahami dan menjelaskan fenomena secara mendalam dan lebih terperinci.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

BAB ini membahas mengenai latar belakang dari penelitian, melihat rumusan masalah, pertanyaan penelitian, menentukan tujuan penelitian, manfaat penelitian, menjelaskan studi pustaka, menjabarkan kerangka konseptual yang digunakan, metodologi dalam penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II Integrasi Finansial ASEAN

BAB ini akan menjelaskan bagaimana integrasi finansial ASEAN berkembang dari waktu ke waktu, termasuk beberapa kerangka kerja, kesepakatan dan perjanjian yang telah dibuat oleh negara-negara anggota ASEAN dalam mewujudkan integrasi finansial ASEAN dan membahas beberapa isu dan tantangan yang mungkin timbul selama proses integrasi finansial ASEAN. Hal ini dapat mencakup pembahasan tentang ketidakpastian ekonomi, ketimpangan ekonomi antarnegara, dan perbedaan budaya.

BAB III QRIS Cross-border

Bab ini berisikan penjelasan tentang sejarah, kebijakan, dan sistematika terkait QRIS Cross-border. Bab ini juga peneliti juga memuat penjelasan terkait sistem LCS yang digunakan oleh QRIS Cross-border dan juga penjelasan tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam implementasi kerjasama yang dilakukan ASEAN terkait QRIS Cross-border ini.

BAB IV Peran Indonesia dalam Integrasi Finansial ASEAN melalui QRIS Cross-border.

Dalam Bab ini, peneliti akan menganalisis peran Indonesia dalam integrasi finansial ASEAN melalui QRIS Cross-border. Bab ini juga akan mengaplikasikan konsep teori 17 peran negara dari KJ Holsti dalam menganalisis peran Indonesia dalam integrasi finansial ASEAN melalui QRIS Cross-border.

BAB V Penutup

Pada Bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti. Kesimpulan ini mencakup intisari dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, yang kemudian menjadi dasar dari hasil penelitian ini. Setelah itu juga akan terdapat saran ataupun rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, sehingga penelitian ini dapat terus dikembangkan.

